

RANCANG BANGUN PENINGKATAN DAYA SAING SDM INDONESIA

KEDEPUTIAN BIDANG SDM DAN KEBUDAYAAN
email : nina@bappenas.go.id

ABSTRAK

Tujuan kajian adalah menyusun konsep kebijakan dan strategi nasional rancang bangun peningkatan daya saing SDM Indonesia dalam mendukung daya saing dan pertumbuhan ekonomi nasional di bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, industri dan ketenagakerjaan. Metodologi kajian dilakukan melalui studi literatur, *workshop* dan diskusi terbatas, serta analisa sintesa. Data bahan analisa dikumpulkan dari hasil paparan para nara sumber pada pelaksanaan *workshop* serta berbagai sumber terkait di bidang kependudukan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan industri.

Kesimpulan kajian adalah bahwa peningkatan daya saing SDM tidak terlepas dari peran berbagai sektor. Rancang bangun peningkatan daya saing SDM memerlukan upaya sinergis antar berbagai bidang pembangunan, baik di sisi penyedia SDM (*supply*) maupun dari sisi pemanfaat (pengguna) SDM (*demand*). Pada sisi *supply*, komponen yang berperan adalah kependudukan, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan dari sisi *demand*, komponen yang berperan adalah ketenagakerjaan dan industri. Kebijakan daya saing SDM di bidang pendidikan dilakukan melalui peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik, peningkatan mutu lembaga pendidikan, penerapan karakter bangsa, pengembangan pendidikan manusia yang berjiwa kreatif, inovatif, sportif dan wirausaha, penguatan dan perluasan pemanfaatan TIK, penguatan kemitraan strategis dan penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Fokus peningkatan daya saing di bidang kesehatan pada perbaikan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dalam penanganan angka kesakitan dan kematian baik pada aspek preventif-promotif maupun kuratif-rehabilitatif. Instrumen utama peningkatan daya saing pelayanan kesehatan adalah peningkatan akses, kualitas (*quality*), efisiensi, cakupan (*coverage*), kesetaraan (*equity*), serta keberlanjutan (*sustainability*) dilakukan pada pelayanan kesehatan primer di puskesmas dan jaringannya dan pelayanan kesehatan sekunder dan tersier di rumah sakit. Di bidang ketenagakerjaan diperlukan pengembangan sumberdaya manusia berbasis kompetensi dengan membangun infrastruktur kompetensi pekerja sebagai tahap awal dalam mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten agar dapat bersaing dalam pasar kerja global. Di bidang industri difokuskan pada pendidikan tinggi teknik, dengan ciri-ciri mampu dan mau menanggung risiko, memiliki jiwa kepemimpinan, kreatif, disiplin dan entrepreneurs.

daya saing, kreatif, inovatif.

1 LATAR BELAKANG

Visi Pembangunan Indonesia ke depan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 adalah menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Salah satu misi dalam rangka mewujudkan visi tersebut adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing, melalui pembangunan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek, pembangunan infrastruktur yang maju, reformasi di bidang hukum dan aparaturnegara, serta memperkuat perekonomian domestik.

Pembangunan SDM memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan manusia Indonesia yang maju dan mandiri sehingga mampu berdaya saing dalam era globalisasi. Globalisasi menuntut adanya efisiensi dan daya saing dalam pembangunan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, kependudukan), iptek, dunia usaha (industri), dan ketenagakerjaan. Sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam persaingan global, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global.

Dimensi daya saing dalam SDM menjadi faktor penting untuk memacu kualitas SDM terutama melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan, pengembangan, penguasaan, dan pemanfaatan iptek, serta peningkatan kualitas tenaga kerja. Masa depan suatu bangsa tergantung pada seberapa baik kualitas pendidikan dan sumber daya manusia bangsa tersebut. Kelanggungan daya saing suatu negara ditentukan oleh kemampuannya mendayagunakan sumber daya keunggulan yang dimiliki untuk memperkuat posisi di dalam persaingan global, sehingga negara tersebut dapat menggali potensi yang ada di negaranya maupun di negara-negara lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperbaiki tingkat dan distribusi kesejahteraan masyarakat, serta melakukan investasi untuk memperbarui sumber daya keunggulannya secara berkelanjutan.



Daya saing sangat berkaitan erat dengan tingkat produktivitas. *Michael Porter* secara tegas menyatakan produktivitas merupakan akar penentu tingkat daya saing baik pada level individu, perusahaan, industri maupun pada level negara. Produktivitas sendiri merupakan standar hidup dan sumber pendapatan individual maupun perkapita. Sedangkan daya saing pada dasarnya adalah kemampuan untuk menciptakan suatu tingkat kemakmuran (*prosperity*). *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* mendefinisikan daya saing sebagai tingkat kemampuan suatu negara menghasilkan barang dan jasa yang sesuai dengan tuntutan pasar internasional dan bersamaan dengan itu kemampuan menciptakan suatu kesejahteraan berkelanjutan bagi negaranya. Dengan demikian terdapat hubungan yang sejalan antara tingkat produktivitas dan tingkat daya saing.

Berbagai program dalam rangka peningkatan daya saing telah dilakukan, misalnya dengan meningkatkan dana pendidikan, penelitian, dan pengembangan iptek, menetapkan enam fokus program riptek (riset iptek) yang terdiri dari ketahanan pangan, pengembangan energi baru dan terbarukan, pengembangan teknologi dan manajemen transportasi, pengembangan ICT (*information communication technology*), pengembangan teknologi pertahanan dan keamanan, dan pengembangan teknologi kesehatan dan obat. Namun demikian, hasil program tersebut masih dinilai belum maksimal memberikan manfaat bagi perekonomian dan masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan pengembangan SDM adalah penting, namun tidak cukup untuk pencapaian daya saing dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan tersebut seharusnya dikoordinasikan dan diintegrasikan dengan kebijakan pendukung lainnya serta dijalankan dalam sistem inovasi nasional yang efektif.

Kajian Prakarsa Strategis Rancang Bangun Peningkatan Daya Saing SDM Indonesia dilakukan dalam kerangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia sekaligus mendukung daya saing dan pertumbuhan ekonomi nasional.

2 TUJUAN

Tujuan umum kajian ini adalah menyusun kebijakan dan strategi nasional rancang bangun peningkatan daya saing SDM Indonesia dalam rangka mendukung daya saing dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Tujuan khusus kajian adalah :

- Merumuskan kebijakan dan strategi peningkatan daya saing pendidikan, kesehatan, dan kependudukan,
- Merumuskan kebijakan dan strategi peningkatan daya saing pembangunan industri dan ketenagakerjaan.

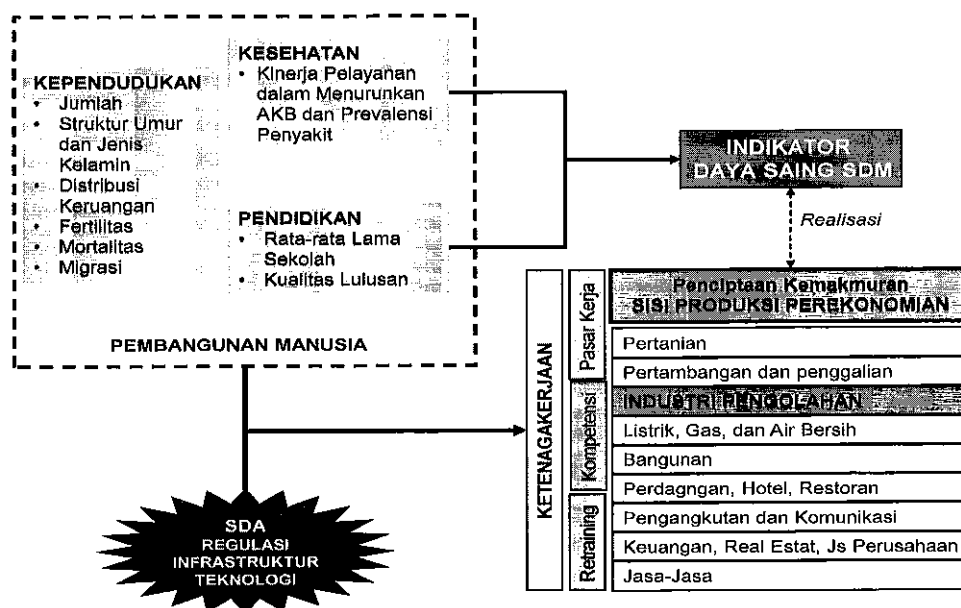
Keluaran kajian adalah tersusunnya kerangka konsep strategi dan kegiatan pokok peningkatan daya saing SDM Indonesia di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan industri.

Manfaat kajian adalah masukan bagi penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan industri.

3. METODOLOGI

3.1. KERANGKA ANALISIS

Peningkatan kualitas daya saing SDM dipengaruhi oleh faktor dan kondisi pada sisi penyedia (*supply*) dan sisi pengguna (*demand*). Keterkaitan antara *supply* dan *demand* akan mendorong peningkatan kualitas kualitas dan daya saing SDM. Faktor utama dalam peningkatan daya saing kualitas SDM pada sisi *supply* ditentukan oleh kondisi kependudukan serta dorongan peningkatan kualitas akses dan pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan (*supply push*). Sementara itu faktor utama pada sisi *demand* ditentukan oleh kompetensi ketenagakerjaan (pasar kerja) dan tarikan kebutuhan kualitas SDM di pasar/ industri/perusahaan (*demand pull*).



Gambar 1. Kerangka Pikir Kajian

3.2. METODE PELAKSANAAN KAJIAN

3.2.1 Studi Literatur

- Mengungkap berbagai penemuan, penelitian, pendekatan dan strategi baru dalam upaya meningkatkan kualitas SDM Indonesia;
- Mengidentifikasi *lesson learned* terhadap hasil penelitian yang dilakukan pihak lain.

3.2.2 Workshop dan Diskusi Terbatas

- Mendapatkan *review* terhadap kerangka pikir kajian dari komponen daya saing SDM bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan dan industri dan ketenagakerjaan;
- Mendapatkan masukan rumusan kebijakan dan strategi peningkatan daya saing di bidang pendidikan, kesehatan dan kependudukan, industri dan ketenagakerjaan.

3.2.3 Sintesa

- Menganalisa gagasan dan pemikiran narasumber serta temuan dari berbagai studi literatur untuk mendapatkan berbagai rumusan hasil berupa rekomendasi strategi untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia.

3.2.4 Ruang Lingkup Kajian mencakup :

- Telaah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan SDM dalam konteks peningkatan daya saing di bidang pendidikan, kesehatan, industri dan ketenagakerjaan;
- Identifikasi faktor-faktor penentu peningkatan daya saing SDM Indonesia di berbagai sektor;
- Penyusunan strategi lintas sektor dalam peningkatan daya saing SDM;
- Perumusan kegiatan pokok dan indikator kunci dalam peningkatan daya saing nasional dalam sektor terkait.

3.3. DATA

Data yang dikumpulkan dalam rangka pelaksanaan kajian berbentuk data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dari hasil paparan para nara sumber pada pelaksanaan workshop. Sedangkan data sekunder didapat dari berbagai laporan dan sumber-sumber lain yang terkait di bidang kependudukan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan industri.

4. HASIL KAJIAN DAN ANALISIS

4.1. RANCANG BANGUN PENINGKATAN DAYA SAING SDM BIDANG PENDIDIKAN

Kebijakan daya saing SDM di bidang pendidikan dilakukan melalui pengembangan guru sebagai profesi, pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan nonformal, pengawasan dan penjaminan mutu secara terprogram dengan mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP), survei *benchmarking* mutu pendidikan terhadap standar internasional, pengembangan sekolah berbasis keunggulan lokal di setiap kabupaten/kota, pembangunan sekolah bertaraf internasional di setiap provinsi/kabupaten/kota.

Arah kebijakan pendidikan nasional tersebut dijabarkan dalam strategi umum mencakup: (a) peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik; (b) peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan lulusannya; (c) pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah; (d) penerapan Pendidikan Akhlak Mulia dan Karakter Bangsa; (e) pengembangan pendidikan yang bisa membentuk manusia berjiwa kreatif, inovatif, sportif dan wirausaha; (f) peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana pendidikan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan; (g) penguatan dan perluasan pemanfaatan TIK di bidang pendidikan; (h) penguatan kemitraan strategis antara dunia pendidikan dengan masyarakat dan dunia usaha; dan (i) penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia Industri.

4.2.1. Pendidikan Dasar

Strategi layanan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau, dilakukan melalui:

- (1) Penyediaan Pendidikan Dasar berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
- (2) Penyediaan manajemen SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs serta Paket A dan Paket B berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota i;
- (3) Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi berbasis riset, dan standar mutu pendidikan dasar, serta keterlaksanaan akreditasi pendidikan dasar;
- (4) Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
- (5) Penyediaan subsidi pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
- (6) Penyediaan subsidi pembiayaan pendidikan untuk penerapan sistem pembelajaran Paket A dan B berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.

4.2.2. Pendidikan Menengah

Strategi pendidikan menengah dalam rangka meningkatkan daya saing adalah

- (1) peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah kejuruan, pendidikan tinggi vokasi,
- (2) pelatihan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pembangunan termasuk kebutuhan lokal untuk menghasilkan lulusan yang siap memasuki dunia kerja dan memiliki etos kewirausahaan,

- (3) harmonisasi dan sinergi antara pendidikan menengah kejuruan, pendidikan tinggi vokasi dan pelatihan keterampilan,
- (4) memperkuat intermediasi dan memperluas kesempatan pemagangan serta penyalarsan pendidikan/pelatihan dengan dunia kerja.

4.2.3. Pendidikan Karakter Bangsa

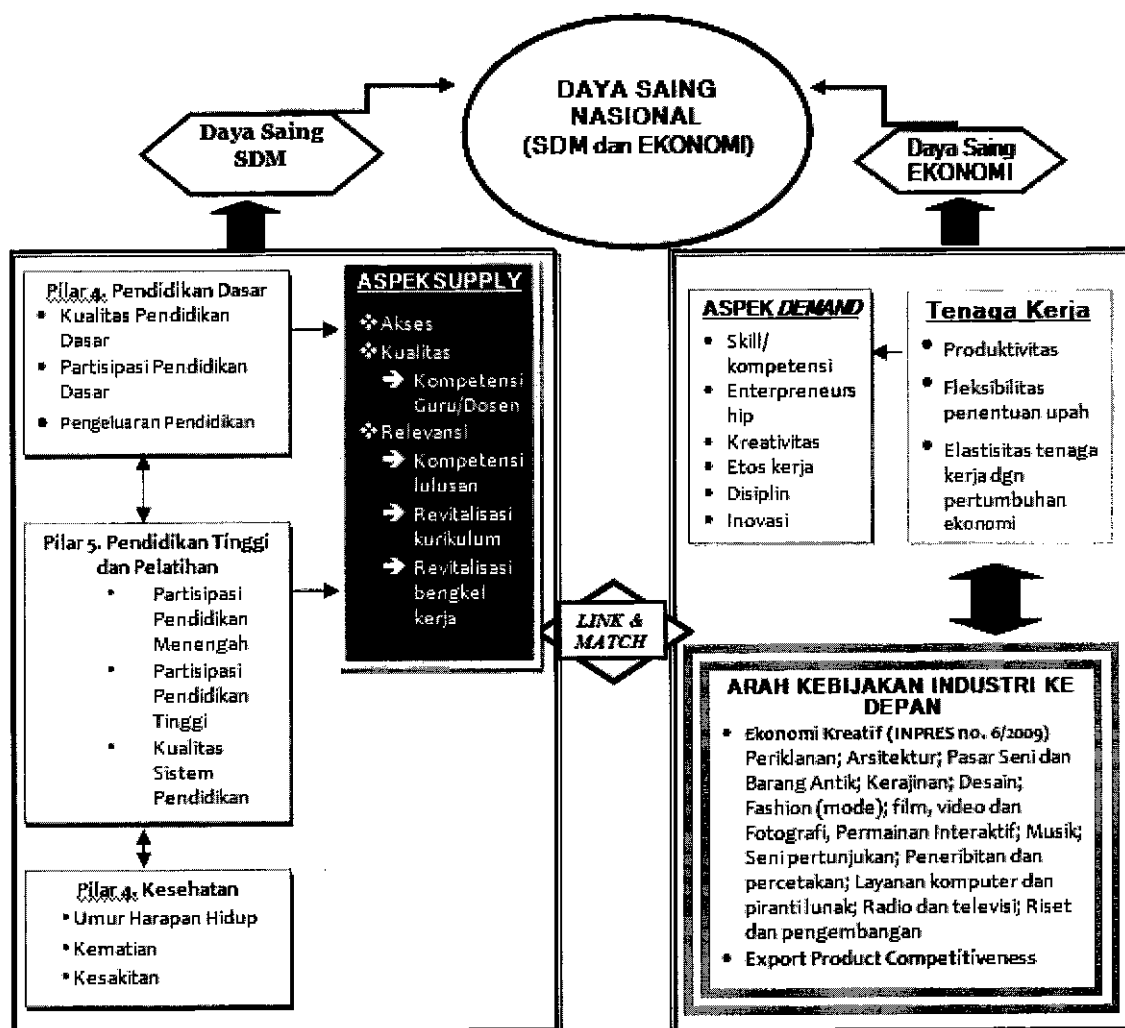
Strategi pelaksanaan pendidikan karakter bangsa dilakukan dengan cara:

- (1) menanamkan pendidikan karakter bangsa termasuk kewirausahaan ke dalam semua mata pelajaran, bahan ajar, ekstrakurikuler, maupun pengembangan diri,
- (2) mengembangkan kurikulum pendidikan yang memberikan muatan pendidikan karakter bangsa yang mampu meningkatkan pemahaman tentang kedisiplinan, kreatif, kerja keras, kepemimpinan, inovatif, menumbuhkan jiwa dan karakter wirausaha serta menumbuhkan skill berwirausaha, dan;
- (3) menumbuhkan budaya bangsa di lingkungan sekolah.

4.2.4. Pendidikan Tinggi

Strategi untuk menjangkau layanan pendidikan tinggi yang bermutu, relevan, berdaya saing internasional adalah sebagai berikut:

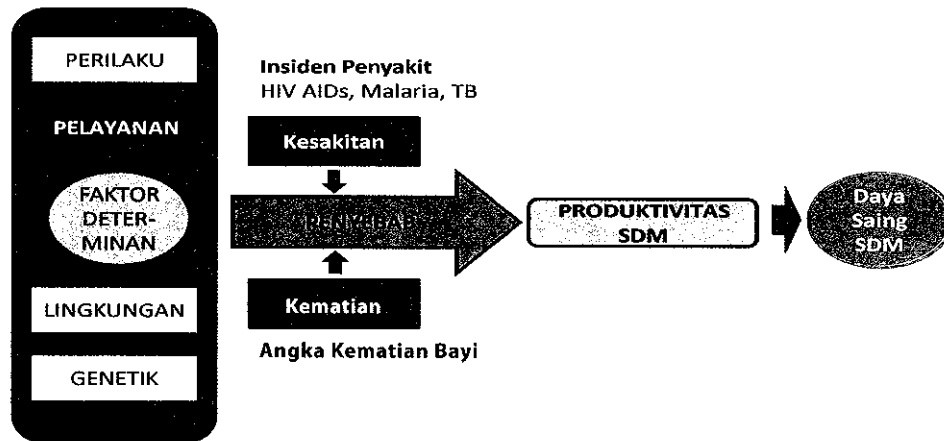
- (1) penyediaan dosen berkompeten untuk mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing;
- (2) peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung pelaksanaan tridharma yang berdaya saing dan akuntabel;
- (3) penyediaan data dan informasi berbasis riset dan standar mutu pendidikan tinggi serta keterlaksanaan akreditasi pendidikan tinggi;
- (4) penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran perguruan tinggi berkualitas dan berdaya saing yang merata di seluruh provinsi;
- (5) peningkatan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas, berdaya saing internasional, dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara;
- (6) penyediaan subsidi pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan perguruan tinggi berkualitas yang merata di seluruh provinsi.



Gambar 2. Rancang Bangun Daya Saing SDM Bidang Pendidikan

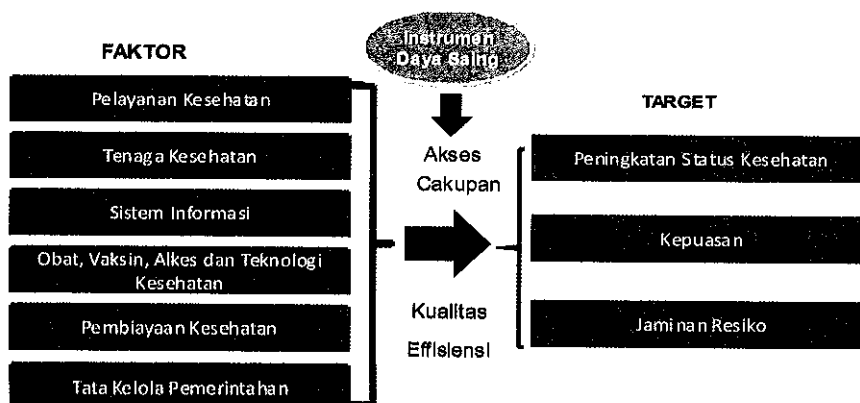
4.2. RANCANG BANGUN PENINGKATAN DAYA SAING SDM BIDANG KESEHATAN

- (1) Peningkatan daya saing SDM di bidang kesehatan dilakukan melalui pendekatan SDM sebagai objek sekaligus sebagai subyek pembangunan. Pembangunan kesehatan sebagai objek menitikbertakan pembangunan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga SDM tersebut memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Pembangunan kesehatan sebagai subjek menitikberatkan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan didukung oleh keberadaan tenaga kesehatan memadai dengan tingkat kompetensi dan keterampilan profesional.
- (2) Faktor determinan yang berpengaruh terhadap angka kesakitan dan kematian adalah perilaku, pelayanan kesehatan, lingkungan dan genetik. Faktor determinan yang dikaji adalah pada aspek pelayanan kesehatan dan perilaku. Selanjutnya kedua faktor tersebut berdampak terhadap angka kesakitan dan angka kematian dan menjadi faktor penyebab tingkat produktivitas SDM dan selanjutnya berpengaruh terhadap daya saing pembangunan nasional sebagaimana gambar 3.



Gambar 3. Kerangka Kajian Peningkatan Daya Saing SDM Bidang Kesehatan

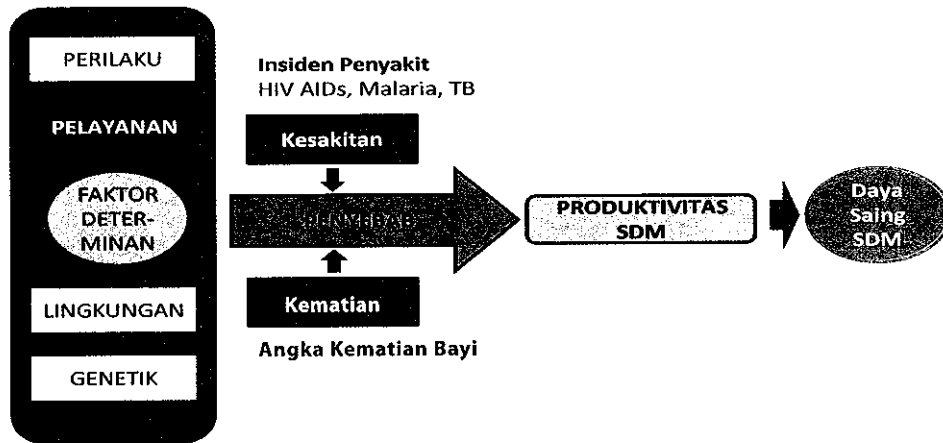
- (3) Instrumen utama dalam peningkatan daya saing pelayanan kesehatan adalah peningkatan akses, kualitas (quality), efisiensi, cakupan (coverage), kesetaraan (equity), serta keberlanjutan (sustainability). Ciri utama terjadinya peningkatan daya saing pelayanan kesehatan adalah meningkatnya status kesehatan, berkurangnya disparitas pencapaian status kesehatan, terpenuhinya target pencapaian SPM dan MDGs. Fokus peningkatan daya saing di bidang kesehatan diarahkan pada (1) perbaikan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, serta (2) dukungan kebijakan baik pada aspek pelayanan kesehatan bersifat preventif dan promotif maupun pada aspek pelayanan kesehatan bersifat kuratif dan rehabilitatif.
- (4) Fokus kebijakan peningkatan daya saing pelayanan kesehatan dimaksud ditujukan dalam upaya peningkatan status kesehatan, terutama dalam penurunan angka kematian bayi, angka kesakitan akibat HIV dan AIDS, malaria dan TB serta penurunan dampak ekonomi akibat ketiga penyakit tersebut yang dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan primer di puskesmas dan jaringannya serta pelayanan kesehatan sekunder dan tersier di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- (5) Faktor penentu dalam peningkatan daya saing pelayanan kesehatan ditentukan oleh perbaikan kualitas tenaga kesehatan, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, dukungan pembiayaan yang memadai, pemanfaatan teknologi yang tepat, serta penerapan standar pelayanan minimal pada seluruh aspek pelayanan kesehatan. Faktor tersebut sebagai penentu dalam pelayanan kesehatan pada aspek pelayanan yang bersifat preventif dan promotif maupun kuratif dan rehabilitatif. Infrastruktur pelayanan kesehatan mencakup pelayanan administrasi, pelayanan medis, pelayanan pemeriksaan laboratorium, pelayanan farmasi, pelayanan pembiayaan kesehatan, serta pelayanan dalam rangka promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Gambaran faktor penentu dan instrumen daya saing kesehatan dalam gambar 4.



Gambar 4. Faktor dan Instrumen Daya Saing Kesehatan

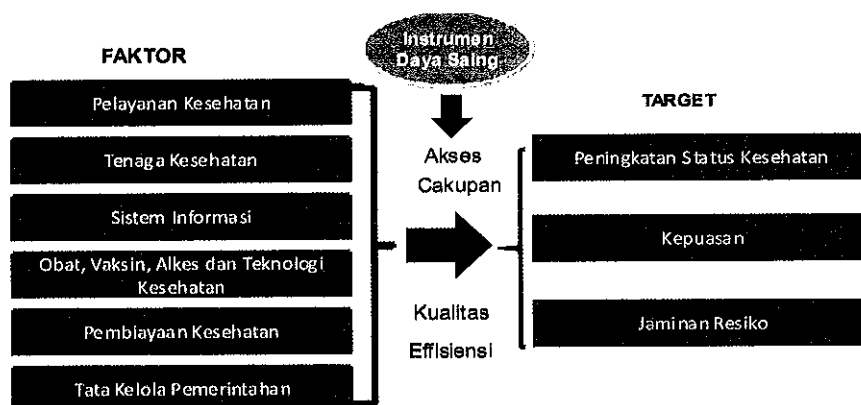
4.2. RANCANG BANGUN PENINGKATAN DAYA SAING SDM BIDANG KESEHATAN

- (1) Peningkatan daya saing SDM di bidang kesehatan dilakukan melalui pendekatan SDM sebagai objek sekaligus sebagai subyek pembangunan. Pembangunan kesehatan sebagai objek menitikbertakan pembangunan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga SDM tersebut memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Pembangunan kesehatan sebagai subjek menitikberatkan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan didukung oleh keberadaan tenaga kesehatan memadai dengan tingkat kompetensi dan keterampilan profesional.
- (2) Faktor determinan yang berpengaruh terhadap angka kesakitan dan kematian adalah perilaku, pelayanan kesehatan, lingkungan dan genetik. Faktor determinan yang dikaji adalah pada aspek pelayanan kesehatan dan perilaku. Selanjutnya kedua faktor tersebut berdampak terhadap angka kesakitan dan angka kematian dan menjadi faktor penyebab tingkat produktivitas SDM dan selanjutnya berpengaruh terhadap daya saing pembangunan nasional sebagaimana gambar 3.



Gambar 3. Kerangka Kajian Peningkatan Daya Saing SDM Bidang Kesehatan

- (3) Instrumen utama dalam peningkatan daya saing pelayanan kesehatan adalah peningkatan akses, kualitas (quality), efisiensi, cakupan (coverage), kesetaraan (equity), serta keberlanjutan (sustainability). Ciri utama terjadinya peningkatan daya saing pelayanan kesehatan adalah meningkatnya status kesehatan, berkurangnya disparitas pencapaian status kesehatan, terpenuhinya target pencapaian SPM dan MDGs. Fokus peningkatan daya saing di bidang kesehatan diarahkan pada (1) perbaikan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, serta (2) dukungan kebijakan baik pada aspek pelayanan kesehatan bersifat preventif dan promotif maupun pada aspek pelayanan kesehatan bersifat kuratif dan rehabilitatif.
- (4) Fokus kebijakan peningkatan daya saing pelayanan kesehatan dimaksud ditujukan dalam upaya peningkatan status kesehatan, terutama dalam penurunan angka kematian bayi, angka kesakitan akibat HIV dan AIDS, malaria dan TB serta penurunan dampak ekonomi akibat ketiga penyakit tersebut yang dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan primer di puskesmas dan jaringannya serta pelayanan kesehatan sekunder dan tersier di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- (5) Faktor penentu dalam peningkatan daya saing pelayanan kesehatan ditentukan oleh perbaikan kualitas tenaga kesehatan, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, dukungan pembiayaan yang memadai, pemanfaatan teknologi yang tepat, serta penerapan standar pelayanan minimal pada seluruh aspek pelayanan kesehatan. Faktor tersebut sebagai penentu dalam pelayanan kesehatan pada aspek pelayanan yang bersifat preventif dan promotif maupun kuratif dan rehabilitatif. Infrastruktur pelayanan kesehatan mencakup pelayanan administrasi, pelayanan medis, pelayanan pemeriksaan laboratorium, pelayanan farmasi, pelayanan pembiayaan kesehatan, serta pelayanan dalam rangka promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Gambaran faktor penentu dan instrumen daya saing kesehatan dalam gambar 4.

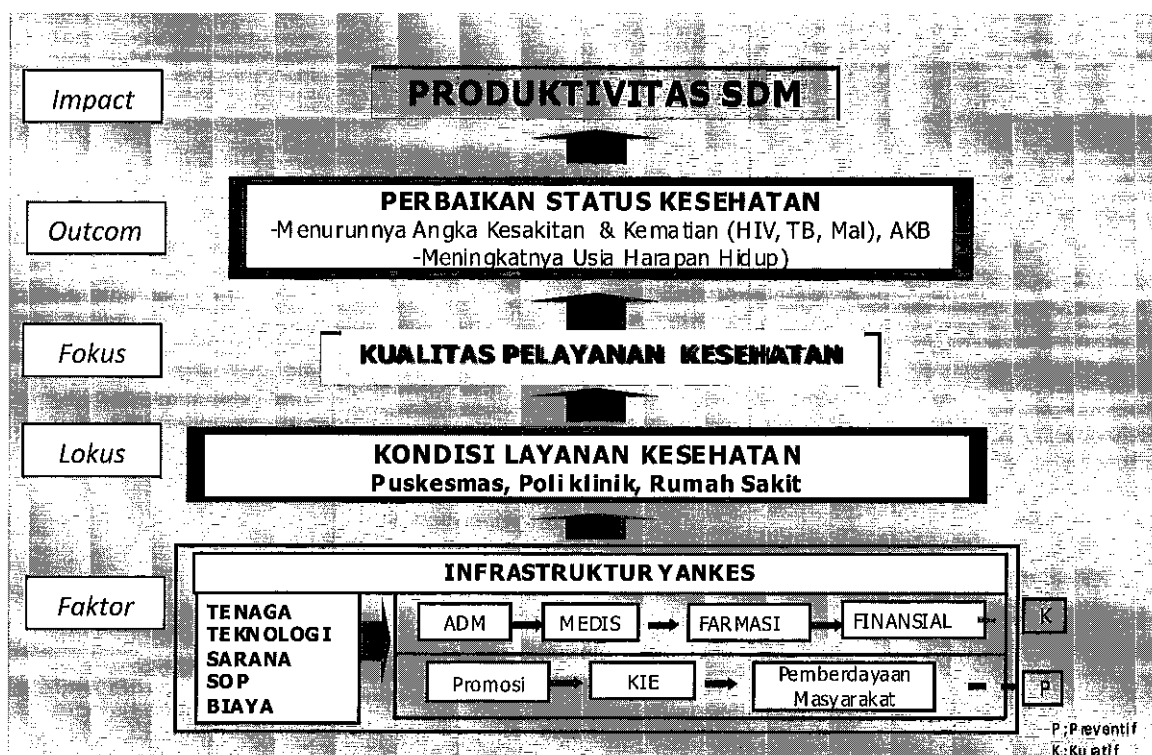


Gambar 4. Faktor dan Instrumen Daya Saing Kesehatan

Strategi yang perlu dikembangkan dalam mendorong peningkatan daya saing kesehatan dilakukan dengan memperbaiki akses dan kualitas pelayanan kesehatan, dengan fokus pada peningkatan upaya pencegahan, pengobatan dan pemulihan kesehatan, yang dilakukan melalui:

- (1) peningkatan kualitas SDM kesehatan,
- (2) dukungan pembiayaan yang memadai,
- (3) penyediaan sarana dan prasarana yang mencukupi dan berkualitas,
- (4) penyediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memadai dan berkualitas,
- (5) promosi dan pemberdayaan kesehatan, serta
- (6) perbaikan manajemen dan sistim informasi kesehatan, didukung oleh sistem pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM), standarisasi, sertifikasi, lisensi, akreditasi dan penegakan hukum, serta penelitian dan pengembangan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai.

Rancang bangun dalam peningkatan daya saing bidang kesehatan berfokus pada perbaikan kualitas untuk bekerjanya seluruh komponen/elemen sistem/infrastruktur pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan perbaikan status kesehatan masyarakat sehingga memiliki tingkat produktivitas yang tinggi seperti digambarkan pada gambar 5.



Gambar 5. Rancang Bangun Daya Saing SDM Melalui Bidang Kesehatan

Langkah-langkah kebijakan yang perlu dilakukan dalam rangka mendukung upaya penurunan angka kematian bayi, penurunan angka kesakitan akibat HIV dan AIDS, malaria dan TB serta penurunan dampak ekonomi akibat HIV dan AIDS, TB dan malaria.

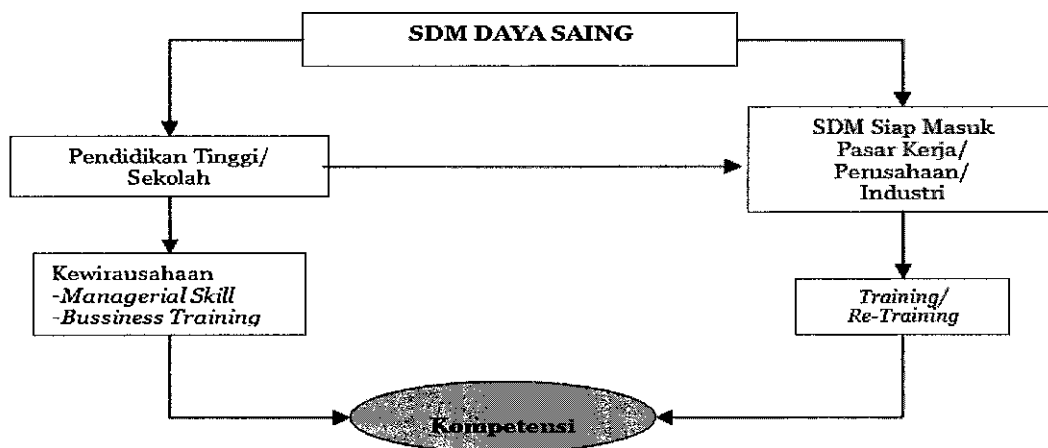
- a. **Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan untuk menurunkan angka kematian bayi, melalui** peningkatan kualitas pelayanan dalam pemberian imunisasi, peningkatan pelaksanaan strategi MTBS, penanganan permasalahan gizi pada anak yang difokuskan untuk menurunkan prevalensi, penerapan strategi kesehatan anak pada tingkat keluarga, peningkatan pelayanan kesehatan neonatal dan ibu, dan penguatan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan, melalui: (i) promosi pelayanan kesehatan dasar dan revitalisasi Posyandu; (ii) peningkatan fasilitas kesehatan hingga menjadi PONEK dan PONEK; dan (iii) penyediaan biaya operasional kesehatan untuk rumah sakit dan puskesmas.
- b. **Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan untuk menurunkan angka kesakitan akibat HIV dan AIDS, melalui :** (i) peningkatan jumlah fasilitas perawatan, pengobatan serta konseling dan testing HIV yang berkelanjutan; (ii) penguatan kemampuan menerapkan upaya pencegahan; dan (iii) peningkatan cakupan seluruh program pencegahan dan pengobatan; (iv) mengembangkan panduan nasional untuk pengarusutamaan HIV/AIDS, dan penyesuaian terhadap kondisi setempat; dan (v) peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengendalian HIV/AIDS.
- c. **Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan untuk menurunkan angka kesakitan malaria, melalui :** **penguatan pelayanan kesehatan dalam pencegahan, pengendalian dan pengobatan, melalui :** (i) promosi pencegahan dan pengendalian malaria pada masyarakat; (ii) deteksi dini dan akses perawatan ke fasilitas kesehatan; (iii) manajemen kasus

yang tepat waktu; (iv) penguatan pos malaria desa; (v) integrasi program malaria dengan program kesehatan ibu dan anak; (vi) penguatan diagnosis yang akurat dan cepat; dan (vii) pengobatan malaria yang efektif; dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di semua aspek.

- d. **Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan untuk menurunkan angka kesakitan TB, melalui :** (i) penguatan kapasitas laboratorium diagnostik di seluruh sarana pelayanan kesehatan; (ii) penerapan standar internasional penanganan TB; (iii) peningkatan kemitraan yang melibatkan pemerintah, nonpemerintah dan swasta dalam penanggulangan TB; (iv) penyediaan tenaga kesehatan yang memadai baik kuantitas maupun kualitas; (v) penyediaan obat; (vi) peningkatan kerjasama program TB/HIV; (vii) peningkatan promosi perawatan berbasis masyarakat; (viii) peningkatan cakupan penemuan kasus dan layanan pengobatan untuk TB di seluruh pelayanan kesehatan; (ix) peningkatan layanan dukungan konseling; dan (x) penyediaan sarana dan prasarana pelayanan TB sesuai standar.
- e. **Peningkatan Kualitas Promosi Kesehatan, melalui** (i) penyediaan layanan KIE; (ii) peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di tingkat rumah tangga; (iii) peningkatan mobilisasi partisipasi masyarakat melalui kegiatan posyandu yang meliputi pemantauan status gizi bayi dan balita melalui penimbangan bulanan, pemberian imunisasi lengkap dan layanan kesehatan lainnya.
- f. **Peningkatan Dukungan Kebijakan, Informasi dan Pendanaan, melalui** mobilisasi sumber dana tambahan dalam penurunan angka kematian bayi, penurunan kesakitan akibat HIV/AIDS, malaria, dan TB, peningkatan koordinasi lintas sektor dan *good governance*, penguatan sistem informasi dan sistem monitoring dan evaluasi, peningkatan advokasi kebijakan bagi daerah dengan tingkat pencapaian target kesehatan anak yang masih rendah dan angka kesakitan yang masih tinggi, peningkatan struktur manajemen dan tata kelola yang meliputi strategi, program kerja, dan sistem informasi, penguatan kebijakan dan peraturan dalam pengendalian penyakit.

4.3. RANCANG BANGUN PENINGKATAN DAYA SAING SDM BIDANG KETENAGAKERJAAN

Strategi yang diperlukan di bidang ketenagakerjaan adalah melalui pengembangan sumberdaya manusia berbasis kompetensi (Gambar 6). Langkah utama yang diperlukan dan sangat mendesak untuk dilaksanakan dengan membangun infrastruktur pengembangan kompetensi pekerja. Pembangunan infrastruktur ini merupakan tahap awal dalam mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten agar dapat bersaing dalam pasar kerja global.



Gambar 6. Kerangka Pikir SDM Daya Saing Ketenagakerjaan

Rancangan Pengembangan TENAGA KERJA Berbasis Kompetensi (PTKKBK), memberikan gambaran tentang arah, sasaran, dan strategi yang harus dikembangkan. Rancang Bangun PTKKBK ini akan berfungsi sebagai acuan dan kerangka kerja nasional (*National Framework*), bagi semua pemangku kepentingan dalam PTKKBK.

Kebijakan dan Program PSBK

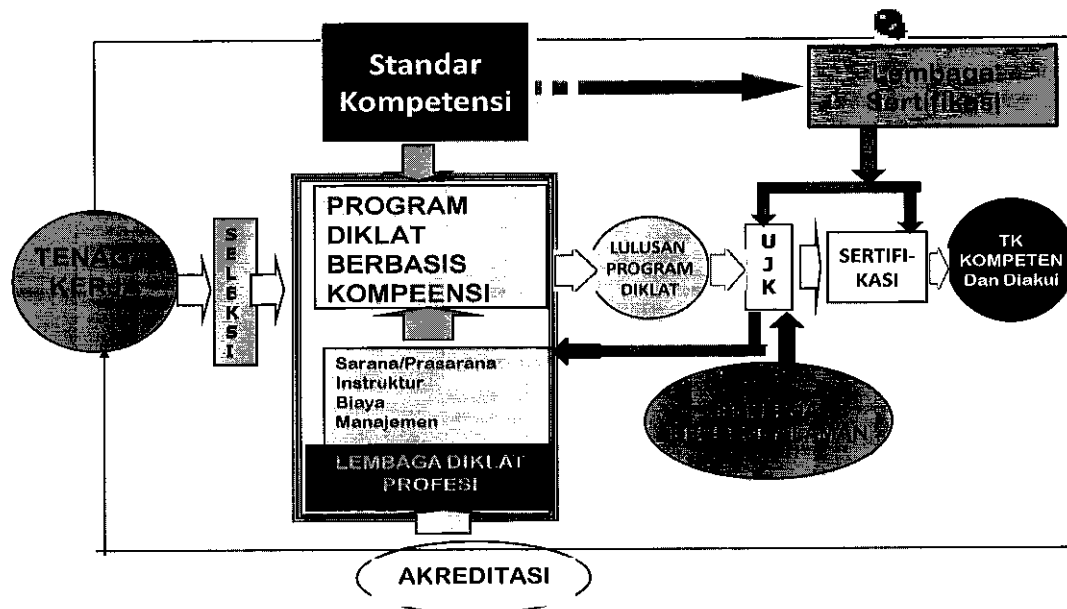
- a) **Pengembangan Standar Kompetensi kerja dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.** Standar kompetensi kerja dapat bersifat individual perusahaan/kelompok perusahaan, dan dapat pula bersifat nasional dalam arti lintas perusahaan/kelompok perusahaan.
- b) **Peningkatan Kapasitas dan Kredibilitas Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi.** Fokus pengembangannya adalah pada peningkatan relevansi, kualitas, efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- c) **Peningkatan Kapasitas dan Kredibilitas Lembaga Sertifikasi Kompetensi Profesi.** Sertifikasi kompetensi profesi dilakukan oleh lembaga yang independen, sehingga antara produsen kompetensi dan penjamin mutu kompetensi, akan lebih baik bila terpisah. Penjaminan mutu kompetensi melalui sertifikasi kompetensi, dilaksanakan dengan menggunakan sistem manajemen mutu yang universal. Dengan demikian, kredibilitas sertifikasi kompetensi di Indonesia akan lebih mudah diterima oleh negara lain.

d) Harmonisasi Regulasi

Harmonisasi regulasi di bidang standarisasi dan sertifikasi kompetensi serta pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, merupakan hal yang sangat krusial dan mendesak untuk dilakukan, agar Indonesia memiliki infrastruktur perundang-undangan yang kokoh.

e) Peningkatan Rekognisi Kompetensi

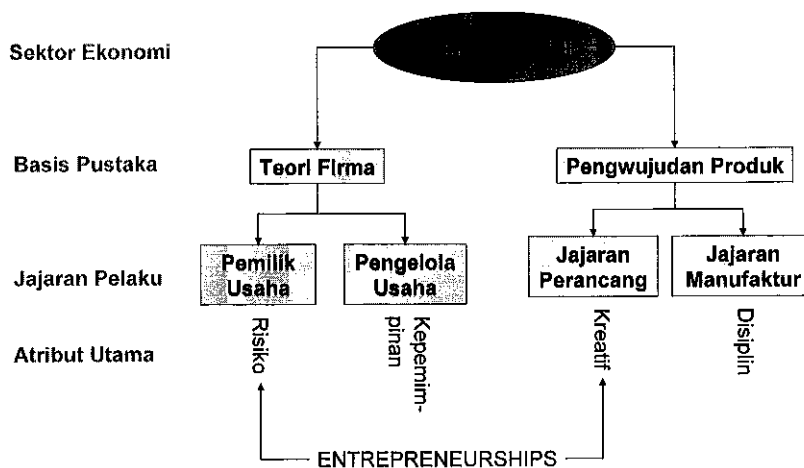
Rekognisi kompetensi merupakan kunci motivasi masyarakat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi serta sertifikasi kompetensi.



Gambar 7. Proses Pengembangan Tenaga Kerja berbasis Kompetensi

4.4 RANCANG BANGUN PENINGKATAN DAYA SAING SDM BIDANG INDUSTRI

- (1) Strategi membangun SDM yang menjadi basis industrialisasi di Indonesia difokuskan pada upaya rekayasa budaya dan sosial melalui pendidikan, khususnya untuk industrialisasi, dengan fokus perhatian pada pendidikan tinggi teknik.
- (2) Pembangunan pendidikan tinggi teknik di Indonesia perlu diarahkan untuk membangun masyarakat (segmen masyarakat) dengan ciri-ciri : mampu dan mau menanggung risiko, memiliki jiwa kepemimpinan, kreatif, disiplin, *entrepreneurs*.



5.1 KESIMPULAN

Peningkatan daya saing SDM tidak terlepas dari peran berbagai sektor. Dengan demikian rancang bangun peningkatan daya saing SDM memerlukan upaya sinergis antar berbagai bidang pembangunan, baik di sisi penyedia SDM (*supply*) maupun dari sisi pemanfaat (pengguna) SDM (*demand*). Pada sisi *supply*, komponen yang berperan dalam mendorong daya saing SDM adalah kependudukan, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan dari sisi *demand*, komponen yang berpengaruh menciptakan tantangan daya saing SDM adalah ketengakerjaan dan industri.

5.2 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisa dari kajian ini, diharapkan seluruh konsep kebijakan dan strategi yang dirumuskan menjadi pertimbangan dalam proses penyusunan perencanaan kebijakan pembangunan dalam sector terkait untuk mendorong peningkatan daya saing sektor masing-masing sekaligus mendorong peningkatan daya saing SDM Indonesia.

Dalam kajian rancang bangun peningkatan daya saing SDM Indonesia, komponen yang dikaji masih terbayas aspek kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan dan industri. Masih banyak komponen lain yang berperan dalam mendorong peningkatan daya saing SDM dan ujungnya meningkatkan daya saing nasional. Untuk itu diperlukan kajian lebih lanjut yang lebih komprehensif berkaitan dengan faktor lain yang berpengaruh dalam mendorong peningkatan daya saing SDM Indonesia, baik dari sisi *supply* maupun dari sisi *demand*. Faktor-faktor tersebut antara lain, aspek kelembagaan, infrastruktur, inovasi teknologi, dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Sonny Harry B. Harmadi, Strategi Pembangunan Kependudukan dalam Peningkatan Daya Saing SDM Indonesia. Workshop Prakarsa Strategis : Rancang Bangun Peningkatan Daya Saing SDM Indonesia, Bappenas, 6 September 2010.
- Ascobat Gani, Strategi Pembangunan Kesehatan Dalam Peningkatan Daya Saing SDM Indonesia. Workshop Prakarsa Strategis : Rancang Bangun Peningkatan Daya Saing SDM Indonesia, Biro Kesehatan dan Gizi, Bappenas, Jakarta, 6 September 2010.
- Ir. Tianggur Sinaga, MA, dkk. Studi Hubungan Kerja Pada Usaha-usaha Ekonomi Informal. Website : nakertrans.go.id
- Michael E. Porter, *The Competitive Advantage of Nations*, New York: The Free Press, 1990.
- Tumar Sumihardjo, *Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Pengembangan Daya Saing Berbasis Potensi Daerah*, Penerbit : Fokusmedia, Bandung.
- Wardiman Djojonegoro, *Lima Tahun Mengemban Tugas Pengembangan SDM, Tantangan yang Tiada Hentinya*, Balitbang Diknas, 1990.
- Daly, K. "The Business Response to HIV/AIDS: Impact and Responses." UNAIDS, The Prince of Wales Business Leaders Forum (PWBLF) and the Global Business Council on HIV&AIDS. 2000. (hal15 & 18)
- Khalil, *Management of Technology, The Key To Competitiveness and Wealth Creation*, 2000
- World Economic Forum, *Global Competitiveness Report, 2009-2010*
- Ahmad Eryani Yustika, *Pembangunan dan Krisis : Memetakan Perekonomian Indonesia*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002.
- Agus Rahayu. 2008. *Strategi Meraih Keunggulan dalam Industri Jasa Pendidikan (Suatu Kajian Manajemen Stratejik)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- E. A. Kuncoro. 2008. *Leadership sebagai Primary Forces dalam Competitive Strength, Competitive area, Competitive Result guna meningkatkan Daya Saing Perguruan Tinggi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

STRATEGI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERIKANAN DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN DAYA SAING

DIREKTORAT KELAUTAN DAN PERIKANAN
email : kelautan@support.bappenas.go.id

ABSTRAK

Kajian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur perikanan berdasarkan target produksi perikanan yang telah ditetapkan dalam Renstra dan RPJMN 2010-2014 serta membuat rekomendasi strategi/kebijakan pengembangan infrastruktur perikanan yang terkait dengan kewenangan.

Metode yang digunakan meliputi: analisis data sekunder baik terhadap kondisi, kebutuhan/penyediaan infrastruktur, serta kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang dihitung berdasarkan target pertumbuhan/sasaran pembangunan yang terdapat dalam Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan serta RPJMN 2010-2014; serta analisis data primer berdasarkan hasil verifikasi lapangan. Sementara itu, analisis data yang digunakan dalam kajian ini meliputi: (1) analisis kondisi/status infrastruktur perikanan untuk mengidentifikasi kondisi infrastruktur yang ada; (2) analisis kebutuhan fisik infrastruktur berdasarkan target pertumbuhan/sasaran pembangunan untuk melihat total kebutuhan infrastruktur untuk mendukung tingkat pertumbuhan produksi, nilai tambah, dan daya saing produk perikanan; (3) analisis kebutuhan non-fisik infrastruktur; serta (4) analisis strategi pengembangan infrastruktur.

Berdasarkan hasil pembahasan, terlihat bahwa infrastruktur perikanan di Indonesia belum memadai untuk mendukung peningkatan produksi sesuai target Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan RPJMN 2010-2014, selain itu penyebaran infrastruktur masih terpusat pada pulau-pulau tertentu saja. Untuk prasarana budidaya, selama tahun 2010-2014 diperlukan penambahan kolam air tawar sebesar 30 ribu ha, keramba jaring apung 246 ribu unit, tambak air payau seluas 245 ribu ha; penambahan/rehabilitasi saluran tambak primer, sekunder dan tersier masing-masing sepanjang 865 km, 4.326 km dan 17.303 km; serta penambahan 297 ribu unit longline. Diperlukan pula tambahan jalan akses sepanjang 544 km dan jalan produksi sepanjang 2.177 km. Selain itu, diperlukan tambahan produksi sebesar 9,4 miliar benih ikan air tawar, 34,7 miliar ikan air payau, 65 juta benih ikan laut, dan 745 ribu ton bibit rumput laut, yang dihasilkan oleh balai-balai benih milik pemerintah dan masyarakat serta penambahan pakan ikan sebanyak 6 juta ton, kebutuhan tertinggi digunakan untuk budidaya ikan patin. Penambahan pabrik pakan baru dari skala rumah tangga maupun menengah serta peningkatan kapasitas terpasang, sudah harus dibangun pada tahun 2011. Untuk mendukung produksi perikanan tangkap sebesar 5,5 juta ton pada akhir tahun 2014, diperlukan penambahan 34 pelabuhan perikanan dan rehabilitasi serta peningkatan 968 pelabuhan yang ada dalam rangka peningkatan mutu dan nilai tambah produk perikanan. Prasarana pengolahan perikanan diperlukan tambahan 387 UPI (pada kapasitas terpasang 70%), penambahan cold storage 63 unit, pabrik es 744 unit. Sementara itu untuk prasarana pemasaran yang prioritaskan untuk mendukung pemasaran dalam negeri dalam rangka peningkatan konsumsi ikan per kapita, diperlukan penambahan depo (pasar grosir) sebanyak 122 unit.

Kesimpulan dari kajian ini adalah: (1) Sebagian infrastruktur perikanan Indonesia tidak dapat secara optimal dimanfaatkan serta mengalami kerusakan; (2) Infrastruktur perikanan budidaya disiapkan untuk mendukung penambahan produksi budidaya sesuai target produksi 2010-2014 melalui ekstensifikasi dan intensifikasi budidaya; untuk ikan bandeng dan udang windu melalui intensifikasi dan diprioritaskan pada wilayah yang telah ditetapkan menjadi kawasan minapolitan dan kebutuhan lahan dimulai sejak tahun 2012; (3) Infrastruktur perikanan tangkap dikonsentrasikan pada kawasan minapolitan dengan melakukan penambahan kapasitas penangkapan di WPP yang terindikasi overfishing; (4) Infrastruktur pengolahan difokuskan pada dukungan infrastruktur dasar (listrik, air dan jalan) dan infrastruktur pemasaran diarahkan pada penyediaan pasar grosir kabupaten maupun antar kabupaten dan penambahan UPI dimulai sejak tahun 2012; (5) Untuk mendukung pengembangan infrastruktur yang meliputi penyediaan, operasionalisasi serta pemeliharaan membutuhkan kebijakan yang kuat pada sistem pemantauan dan pelaporan, pembagian peran pusat dan daerah serta ketersediaan data dukungan infrastruktur dasar seperti listrik, air dan jalan.

Kajian ini merekomendasikan: (1) Penambahan infrastruktur perikanan tangkap perlu dilakukan dengan sangat hati-hati dan selektivitas yang tinggi, dengan memperhitungkan penataan jenis dan jumlah kapal perikanan, alat tangkap, alat bantu penangkapan, serta alur penangkapan dan wilayah penangkapan (2) Pengembangan infrastruktur budidaya berbasis perairan darat (tawar atau payau) diarahkan untuk meningkatkan produktivitas lahan (intensifikasi), sedangkan mariculture diarahkan pada pengembangan

STRATEGI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERIKANAN DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN DAYA SAING

DIREKTORAT KELAUTAN DAN PERIKANAN
email : kelautan@support.bappenas.go.id

ABSTRAK

Kajian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur perikanan berdasarkan target produksi perikanan yang telah ditetapkan dalam Renstra dan RPJMN 2010-2014 serta membuat rekomendasi strategi/kebijakan pengembangan infrastruktur perikanan yang terkait dengan kewenangan.

Metode yang digunakan meliputi: analisis data sekunder baik terhadap kondisi, kebutuhan/penyediaan infrastruktur, serta kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang dihitung berdasarkan target pertumbuhan/sasaran pembangunan yang terdapat dalam Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan serta RPJMN 2010-2014; serta analisis data primer berdasarkan hasil verifikasi lapangan. Sementara itu, analisis data yang digunakan dalam kajian ini meliputi: (1) analisis kondisi/status infrastruktur perikanan untuk mengidentifikasi kondisi infrastruktur yang ada; (2) analisis kebutuhan fisik infrastruktur berdasarkan target pertumbuhan/sasaran pembangunan untuk melihat total kebutuhan infrastruktur untuk mendukung tingkat pertumbuhan produksi, nilai tambah, dan daya saing produk perikanan; (3) analisis kebutuhan non-fisik infrastruktur; serta (4) analisis strategi pengembangan infrastruktur.

Berdasarkan hasil pembahasan, terlihat bahwa infrastruktur perikanan di Indonesia belum memadai untuk mendukung peningkatan produksi sesuai target Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan RPJMN 2010-2014, selain itu penyebaran infrastruktur masih terpusat pada pulau-pulau tertentu saja. Untuk prasarana budidaya, selama tahun 2010-2014 diperlukan penambahan kolam air tawar sebesar 30 ribu ha, keramba jaring apung 246 ribu unit, tambak air payau seluas 245 ribu ha; penambahan/rehabilitasi saluran tambak primer, sekunder dan tersier masing-masing sepanjang 865 km, 4.326 km dan 17.303 km; serta penambahan 297 ribu unit longline. Diperlukan pula tambahan jalan akses sepanjang 544 km dan jalan produksi sepanjang 2.177 km. Selain itu, diperlukan tambahan produksi sebesar 9,4 miliar benih ikan air tawar, 34,7 miliar ikan air payau, 65 juta benih ikan laut, dan 745 ribu ton bibit rumput laut, yang dihasilkan oleh balai-balai benih milik pemerintah dan masyarakat serta penambahan pakan ikan sebanyak 6 juta ton, kebutuhan tertinggi digunakan untuk budidaya ikan patin. Penambahan pabrik pakan baru dari skala rumah tangga maupun menengah serta peningkatan kapasitas terpasang, sudah harus dibangun pada tahun 2011. Untuk mendukung produksi perikanan tangkap sebesar 5,5 juta ton pada akhir tahun 2014, diperlukan penambahan 34 pelabuhan perikanan dan rehabilitasi serta peningkatan 968 pelabuhan yang ada dalam rangka peningkatan mutu dan nilai tambah produk perikanan. Prasarana pengolahan perikanan diperlukan tambahan 387 UPI (pada kapasitas terpasang 70%), penambahan cold storage 63 unit, pabrik es 744 unit. Sementara itu untuk prasarana pemasaran yang prioritaskan untuk mendukung pemasaran dalam negeri dalam rangka peningkatan konsumsi ikan per kapita, diperlukan penambahan depo (pasar grosir) sebanyak 122 unit.

Kesimpulan dari kajian ini adalah: (1) Sebagian infrastruktur perikanan Indonesia tidak dapat secara optimal dimanfaatkan serta mengalami kerusakan; (2) Infrastruktur perikanan budidaya disiapkan untuk mendukung penambahan produksi budidaya sesuai target produksi 2010-2014 melalui ekstensifikasi dan intensifikasi budidaya; untuk ikan bandeng dan udang windu melalui intensifikasi dan diprioritaskan pada wilayah yang telah ditetapkan menjadi kawasan minapolitan dan kebutuhan lahan dimulai sejak tahun 2012; (3) Infrastruktur perikanan tangkap dikonsentrasikan pada kawasan minapolitan dengan melakukan penambahan kapasitas penangkapan di WPP yang terindikasi overfishing; (4) Infrastruktur pengolahan difokuskan pada dukungan infrastruktur dasar (listrik, air dan jalan) dan infrastruktur pemasaran diarahkan pada penyediaan pasar grosir kabupaten maupun antar kabupaten dan penambahan UPI dimulai sejak tahun 2012; (5) Untuk mendukung pengembangan infrastruktur yang meliputi penyediaan, operasionalisasi serta pemeliharaan membutuhkan kebijakan yang kuat pada sistem pemantauan dan pelaporan, pembagian peran pusat dan daerah serta ketersediaan data dukungan infrastruktur dasar seperti listrik, air dan jalan.

Kajian ini merekomendasikan: (1) Penambahan infrastruktur perikanan tangkap perlu dilakukan dengan sangat hati-hati dan selektivitas yang tinggi, dengan memperhitungkan penataan jenis dan jumlah kapal perikanan, alat tangkap, alat bantu penangkapan, serta alur penangkapan dan wilayah penangkapan (2) Pengembangan infrastruktur budidaya berbasis perairan darat (tawar atau payau) diarahkan untuk meningkatkan produktivitas lahan (intensifikasi), sedangkan mariculture diarahkan pada pengembangan